



## PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

# Walikota Larang Sekolah Pungut Dana

YOGYA (KR) - Walikota Yogyakarta Herry Zudianto meminta sekolah terutama negeri untuk tidak melakukan pungutan di awal secara sepihak saat pendaftaran peserta didik baru (PPDB) mendatang. Sedangkan bagi SD dan SMP khususnya yang negeri, karena telah ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bosda, maka tak diperbolehkan untuk memungut dana dari siswa. Kecuali jika sumbangan tersebut diberikan secara sukarela oleh orangtua siswa, bersifat tidak mengikat dan tak ditentukan jumlah besarnya.

"Kalau ada sekolah yang melakukan pungutan di awal secara sepihak, laporkan saja ke saya. Itu jelas penyimpangan aturan. Kami harap masyarakat ikut memantau hal ini. Jika sekiranya ada sekolah yang menyimpang, jangan

sungkan untuk melaporkan, tentu akan kami tindak," tandas walikota menjawab pertanyaan KR di Balai kota, Sabtu (16/5).

Herry mengatakan, sumbangan dana yang masih bisa ditolerir, bila itu tidak mengikat dan besarnya sukarela. "Jika sumbangan itu sifatnya sudah mengikat, jelas tidak diperbolehkan," paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Drs Syamsury MM mengatakan, pihaknya juga meminta para kepala sekolah dapat mematuhi aturan yang telah digariskan, untuk tidak memungut dana di awal, terutama bagi SMA negeri. Secara tegas Syamsury mengatakan, jika ada sekolah yang melanggar aturan, jika itu sekolah negeri langsung akan dilakukan teguran.

Sementara SD dan SMP

memang tidak boleh ada pungutan, karena telah ditanggung oleh dana BOS dan Bosda. "Untuk yang swasta masih diperbolehkan, tapi tetap tidak boleh di awal pendaftaran. Tetap harus ada *rembugan* dengan orangtua siswa saat si anak sudah benar-benar diterima. Jadi jangan sampai ada orangtua yang merasa tertekan, apalagi jika ia berasal dari keluarga tak mampu," ujarnya.

Lebih lanjut walikota mengatakan, pendidikan jangan dianggap sebagai ajang bisnis. Namun yang penting adalah ketersediaan, sehingga siapa yang mampu akan dengan sukarela bisa membantu yang lemah, termasuk dalam pendanaan operasional sekolah. Agar nantinya, pendidikan dapat berjalan dengan baik dan berkualitas, sesuai yang diinginkan bersama. (Ret)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005